



Peran Kesbangpol Dalam Menangani Konflik Antar Ormas Di Kabupaten Lombok Timur

Muhammad Fachrurrozi¹; Ayatullah Hadi²; Rifaid³

^{1,2,3}Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia

¹Correspondence Email: Mhfachrurrozi@gmail.com

Received: 18 March 2025

Accepted: 20 June 2025

Published: 25 June 2025

Abstrak

Konflik antar Ormas di Kabupaten Lombok Timur masih banyak terjadi. Pembinaan terhadap Ormas harus dilakukan secara bertahap sesuai dengan tugas dan fungsi Kesbangpol. Dalam penanganan konflik ini masih membuat masyarakat dari Ormas kurang paham terkait maksud dan tujuan pembinaan yang dilakukan Kesbangpol. Hal ini membuat peneliti ingin meneliti peran Kesbangpol dalam menangani Konflik antar Ormas di Kabupaten Lombok Timur. Metode yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dan mengumpulkan data dengan wawancara. Penelitian ini memberikan hasil dimana masih terdapat banyak konflik antar Ormas yang terjadi, kemudian penanganan dari pemerintah sangat diperlukan. Kesbangpol dalam hal ini merupakan bagian dari pemerintah berperan penting dalam mengatasi konflik dengan cara yang sesuai dengan aturan seperti melakukan Observasi, Deteksi Dini, dan Mediasi. Sehingga peran Kesbangpol dalam menangani konflik antar Ormas dinilai sudah cukup baik dengan berbagai proses dan tahapan yang sesuai dengan peraturan dan regulasi yang berlaku. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa peran Kesbangpol dalam menangani Konflik antar Ormas di Kabupaten Lombok Timur yaitu Observasi, Deteksi Dini, dan Mediasi.

Kata Kunci: Kesbangpol; Konflik; Organisasi Masyarakat.

A. Pendahuluan

Pada hakekatnya pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Landasan pelaksanaan disegala bidang tersebut adalah Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945. Pembangunan sosial politik merupakan salah satu aspek pembangunan nasional yang biasa dipandang sebagai wahana bagi aspek pembangunan lainnya.

Dalam meningkatkan pembangunan di bidang sosial dan politik, aparatur pemerintah harus mendorong masyarakat untuk mengembangkan kreatifitas masyarakat, kegairahan hidup dan memperluas partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Pemerintah berkewajiban memberikan pengarahan dan bimbingan terhadap pertumbuhan kehidupan sosial politik serta menciptakan iklim yang sehat bagi pertumbuhannya. Dilain pihak masyarakat diharapkan juga memberikan tanggapan terhadap pengarahan dan bimbingan yang diberikan oleh aparatur pemerintah serta menciptakan iklim tersebut dengan kegiatan yang nyata (Rohmanudin, 2021).

Kegiatan yang nyata tersebut adalah seperti turut serta dalam suatu organisasi sosial politik dan organisasi kemasyarakatan yang ada sehingga dengan demikian terciptalah komunikasi sosial timbal balik antara masyarakat dengan masyarakat, antara masyarakat dengan pemerintah. Dalam hal ini mampu mendorong semua elemen dari jenjang masyarakat sehingga mampu mengurangi tingkat terjadinya konflik baik itu antar ormas dengan pemerintah dan antar masyarakat dengan pemerintah (Zulianto et al., 2020).

Konflik secara etimologis adalah pertengkaran, perkelahian, perselisihan tentang pendapat atau keinginan; atau perbedaan; pertentangan berlawanan dengan; atau berselisih dengan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) konflik mempunyai arti percekocokan; perselisiah; dan pertentangan. Sedangkan menurut kamus sosiologi konflik bermakna *the overt struggle between individuals or groups within a society, or between nation states*, yakni pertentangan secara terbuka antara individu-individu atau kelompok-kelompok di dalam masyarakat atau antara bangsa-bangsa (Mandak et al., 2022).

Melihat banyaknya Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) yang ada dalam lingkungan daerah Kabupaten Lombok Timur, menjadi sangat penting untuk menanamkan kesadaran yang seimbang dalam diri masyarakat sebagaimana yang dituntut oleh sistim Demokrasi Pancasila dan bagaimana menciptakan suatu mekanisme politik yang dapat menjaga kestabilan politik. Sehingga tugas dan fungsi dari Kesbangpol Kabupaten Lombok Timur terlaksana sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut. Namun dalam hal ini masih sering terjadi konflik.

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, Bupati Kabupaten Lombok Timur dalam hal ini dibantu oleh Kantor KESBANGPOL Kabupaten Lombok Timur sebagai pendukung tugas kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. KESBANGPOL-Kabupaten Lombok Timur merupakan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2009 perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Lombok Timur nomor 4 tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja perangkat daerah Kabupaten Lombok Timur, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Lombok Timur mempunyai tugas pokok dan fungsi (Mediawati, 2019).

Tabel 1.1

Data Konflik Ormas di Kabupaten Lombok Timur (2018-2020)

| Tanggal Publikasi | Lokasi | Konflik |
|-------------------|------------------|------------------------------------|
| 19 Mei 2018 | Kecamatan Sakra | Warga dengan Ormas Ahmadiyah |
| 2 Januari 2022 | Kecamatan Selong | 100 Warga menyerang Ponpes Assunah |
| 4 Januari 2022 | Kecamatan Pancor | NW Pancor dan NW Anjani |

Sumber: Bakesbangpoldagri Lombok Timur, 2022

Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan di KESBANGPOL Kabupaten Lombok Timur pembinaan terhadap organisasi masyarakat harus dilakukan secara bertahap sesuai dengan tugas dan fungsi dari Kesbangpol Kabupaten Lombok Timur. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan banyak masalah yaitu masih adanya organisasi

kemasyarakatan yang tidak terdaftar dan kurangnya pemahaman terhadap maksud dan tujuan dari pelaksanaan pembinaan tersebut bahkan konflik antar ORMAS di Kabupaten Lombok Timur makin marak terjadi.

B. Metode

Metode penelitian yang penulis gunakan yaitu pendekatan kualitatif, direncanakan pada bulan Oktober 2023, lokasi dari penelitian ini dilakukan di kantor Bakesbangpoldagri (Kesbangpol) Selong, Kabupaten Lombok Timur.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data, maka dari itu teknik penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Adapun instrument yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah pedoman wawancara (daftar pertanyaan) dan pedoman observasi.

Penulis menganalisis data dilakukan sejak sebelum terjun ke lapangan, dimulai sejak merumuskan masalah, menyusun pertanyaan, dan berlangsung terus hingga penyusunan hasil penelitian. Pengumpulan data dilakukan secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam mengumpulkan kesimpulan. Penulis mengumpulkan data atau informasi melalui wawancara dengan responden yang dalam hal ini adalah staff dari Bakesbangpoldagri Kabupaten Lombok Timur. Setelah mengumpulkan hasil wawancara, penulis memproses hasil tersebut dan melakukan pengumpulan data selanjutnya

Hasil atau kesimpulan dalam penelitian ini merupakan hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan dengan metode penelitian kualitatif dan disajikan dalam bentuk pernyataan singkat sehingga mudah untuk dipahami sehingga dapat menyimpulkan bagaimana Peran Kesbangpol Lombok Timur dalam menangani Konflik antar Ormas di Kabupaten Lombok Timur.

C. Hasil dan Pembahasan

Kesbangpol Lombok Timur adalah instansi yang menangani berbagai macam isu. Dari isu konflik kenegaraan, kemasyarakatan, politik, dan lain-lain. Contohnya dari isu konflik adalah konflik antar ormas seperti yang terjadi diberbagai wilayah Lombok Timur.

Dalam hal menangani konflik, peran pemerintah menjadi hal yang penting. Bentuk pencegahan dan penanganan konflik oleh pemerintah juga harus tepat sasaran sehingga dapat memberikan hasil yang dapat mendamaikan kedua belah pihak. Melalui manajemen konflik yang baik pula, dapat memberikan hasil yang baik dalam penanganan konflik. Dikutip dari Fendi et al, (2019) Manajemen konflik adalah proses pihak yang terlibat konflik atau pihak ketiga yang menyusun strategi konflik dan menerapkannya untuk mengendalikan konflik agar menghasilkan resolusi yang diinginkan.

Bila pihak-pihak yang terlibat dalam konflik tidak mampu kompromi, maka penyelesaian konflik menemukan jalan buntu. Keadaan demikian memerlukan campur tangan pihak ketiga (pemerintah) yang mempunyai kredibilitas dalam mengelola konflik. Penanganan konflik oleh pemerintah ini khususnya dilakukan oleh KESBANGPOL Kabupaten Lombok Timur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam variabel ini peneliti akan menjelaskan tentang *aracted role* yaitu suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan suatu peran. Dalam hal ini Kesbangpol mempunyai kemiripan yaitu memiliki peranan dalam menangani konflik yang terjadi dan seperti yang kita ketahui Kesbangpol memiliki wewenang untuk menjadi alternatif bagi masyarakat atau Ormas yang berkonflik. Salah satu indikator dari *aracted role* adalah Regulasi.

Regulasi merupakan peraturan yang bertujuan untuk mengendalikan suatu tatanan. Dalam menangani konflik, ada regulasi-regulasi atau aturan-aturan yang harus dipatuhi. Regulasi tersebut merupakan pedoman bagi kesbangpol dalam melaksanakan dan menjalankan tugasnya. Selain itu regulasi Kesbangpol juga terkandung regulasi penyelesaian konflik yang menjadi pengendali apabila terjadi pertentangan di masyarakat.

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Agus Malik Idham, Danramil, Kepala Sub- Penanganan Konflik, Kesbangpol Kabupaten Lombok Timur, mengatakan bahwa :

“Regulasi terkait dengan penangan konflik antar ormas sudah jelas diatur melalui sejumlah regulasi, yaitu undang-undang dan peraturan bupati. Regulasi ini menjadi acuan dalam penanganan konflik antar ormas yang kerap terjadi di Kabupaten Lombok Timur. Sejumlah konflik antar ormas telah kami selesaikan dengan menggunakan regulasi seperti konflik jamaah Salafi dan As-Sunnah dengan masyarakat di Lombok Timur” (Rabu, 4 Oktober 2023).

Agus Malik Idham juga menambahkan :

“Khusus untuk Kesbangpol dalam menangani konflik ormas. pertama kami lihat dulu seberapa jauh dan besar konflik yang dilaporkan. Misalkan konfliknya masih dalam skala ringan kami dari kesbangpol melakukan kunjungan ke pemerintah desa untuk menyelesaikan di daerah tersebut” (Selasa, 23 Oktober 2023).

Berdasarkan wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa dalam dalam menangani konflik ormas. Pertama Kesbangpol mengukur terlebih dahulu seberapa jauh dan besar konflik yang dilaporkan. Jika konfliknya masih dalam skala ringan maka kesbangpol melakukan kunjungan ke pemerintah desa untuk berkoordinasi dalam rangka menyelesaikan konflik antar ormas di daerah tersebut.

Sebagai perbandingan, dalam penyelesaian konflik sosial, jika gagal menemukan solusi, Kesbangpol akan melakukan tindakan sesuai regulasi atau aturan yang sudah ada yaitu akan melakukan pembubaran massa secara paksa oleh SATPOL PP. Sedangkan dalam penanganan konflik antar ormas, semua dapat diselesaikan secara bersama-sama melalui mediasi.

Adapun kegiatan-kegiatan yang sekiranya akan menciptakan keresahan di tengah-tengah masyarakat yang disebabkan oleh adanya oknum yang membawa aliran yang berseberangan dengan agama Islam atau syariat baru, maka Kesbangpol perlu mengambil tindakan untuk melakukan pembubaran.

Berikut data Organisasi Masyarakat yang ada di wilayah Lombok Timur berdasarkan data KESBANGPOL Lombok Timur tahun 2023 :

Tabel 4.5
Data Ormas Lombok Timur

| No. | Jenis Organisasi | Jumlah |
|-----|---|--------|
| 1. | Sosial Kemasyarakatan, Kemanusiaan dan Kepemudaan | 67 |
| 2. | Keagamaan | 63 |
| 3. | Pendidikan | 12 |
| 4. | Persatuan Profesi | 6 |

Sumber: Bakesbangpoldagri Lombok Timur, 2023

Dari berbagai jenis ormas yang ada di Lombok Timur, terdapat beberapa ormas yang pernah terlibat konflik. Berikut daftar konflik antar ormas dan masyarakat di kabupaten Lombok Timur :

Tabel 4.6
Konflik Antar Ormas dan Masyarakat di Kabupaten Lombok Timur

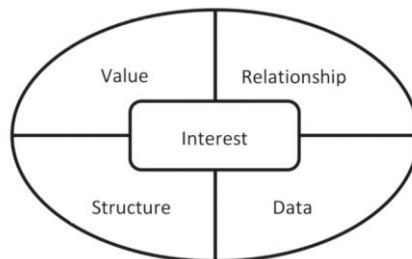
| No. | Ormas | Kasus | Lokasi |
|-----|--------------------------|--|-----------------------------|
| 1. | Ormas Ahmadiyah | Konflik dengan masyarakat Lombok Timur karena menolak keberadaan Ahmadiyah | Kecamatan Sakra Timur |
| 2. | Jamaah Salafi/ Assunnah | Konflik dengan masyarakat yang berbeda paham | Kecamatan Aikmel & Kotaraja |
| 3. | Ormas NW Anjani & Pancor | Konflik terkait aset yayasan | Kecamatan Aikmel & Wanasaba |

Sumber: data dioleh peneliti tahun 2023

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Timur berdasarkan hasil wawancara menyatakan bahwa penyebab konflik yang terjadi antar ormas pada poin 1 dan 2 ini termasuk konflik suatu organisasi dan kelompok masyarakat dimana beberapa konflik terjadi karena perbedaan paham, sehingga masyarakat menolak paham suatu

organisasi yang berada di lingkungan mereka. Poin ke 3 merupakan konflik antar organisasi yang diakibatkan pemberian aset organisasi atau yayasan yang tidak sesuai dengan salah satu pihak sehingga kedua organisasi tersebut tidak menemukan titik terang dan terjadi konflik.

Konflik yang terjadi di atas dapat mencerminkan bagaimana gangguan keamanan dan ketertiban di antara Organisasi Kemasyarakatan yang dapat deskripsikan melalui analisis *Circle Of Conflict*.



Gambar 4.7

Analisis Circle Of Conflict

Konflik antar Ormas dapat dilihat dengan pola di atas, setiap konflik yang terjadi dianalisa dengan empat poin meliputi: masalah hubungan, data, struktural, dan perbedaan nilai.

Setiap kelompok dalam satu organisasi, dimana di dalamnya terjadi interaksi antara satu dengan lainnya, memiliki kecenderungan timbulnya konflik. Dalam organisasi kemasyarakatan terjadi interaksi, baik antara kelompok dengan kelompok, kelompok dengan individu, maupun individu dengan individu antar organisasi kemasyarakatan. Situasi tersebut seringkali dapat memicu terjadinya konflik. Konflik sangat erat kaitannya dengan perasaan manusia, termasuk perasaan diabaikan, tidak dihargai, disepelekan, ditinggalkan, dan juga perasaan kesal karena persaingan. Perasaan-perasaan tersebut sewaktu-waktu dapat memicu timbulnya kemarahan. Keadaan tersebut akan mempengaruhi seseorang dalam melaksanakan kegiatannya secara langsung, dan dapat menurunkan cita-cita awal pembentukan Ormas.

Seiring berjalannya waktu, di dalam organisasi kerap terjadi konflik. Baik konflik internal maupun konflik eksternal antar organisasi. Konflik yang terjadi kadang kala terjadi karena problem kecil. Namun

justru dengan hal yang kecil itulah sebuah organisasi dapat bertahan lama atau tidak (Zainuddin, 2016).

Pola atau tahapan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Timur dalam menangani konflik memiliki peran sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik yang berupa pengamatan secara langsung pada situasi, yang khususnya disini adalah situasi konflik. Observasi dilakukan untuk mendapatkan data yang biasanya berupa laporan atau kegiatan, dan selanjutnya dilakukan pengamatan lebih lanjut.

2. Deteksi Dini

Deteksi dini dilakukan untuk mengidentifikasi potensi terjadinya konflik sejak awal, yang artinya peran KESBANGPOL disini dapat meminimalisir potensi konflik sejak dini atau sebelum konfliknya membesar. Berdasarkan hal tersebut, dengan mengetahui kemungkinan terjadinya konflik maka tingkat kesiapan dalam menghadapi segala kemungkinan perkembangan kondisi konflik yang meluap permukaan akan lebih kokoh. Oleh sebab itu peran dalam deteksi dini konflik dapat mereduksi kerusakan yang mungkin timbul akibat konflik, serta mencegah konflik tersebut meluap permukaan, sehingga tidak jatuh korban yang lebih besar (baik korban jiwa, materil, dan imateril). Selain itu dengan adanya upaya penanggulangan secara dini maka eskalasi konflik untuk menjadi lebih besar dapat ditekan atau dihindari.

3. Mediasi

Mediasi merupakan suatu upaya penyelesaian masalah atau konflik yang dilakukan oleh pihak yang bermasalah dengan bantuan perantara yang tidak memiliki kewenangan memutus. Ada banyak keuntungan dari mekanisme mediasi ini, yaitu penyelesaiannya yang bersifat informal dan diselesaikan sendiri oleh para pihak, sehingga akan sesuai dengan kemauan para pihak yang memang paling

mengetahui inti masalahnya. Melalui mediasi, hubungan para pihak yang mengalami konflik tetap kooperatif dan terjalin dengan baik, karena kunci dari mediasi adalah berlangsungnya musyawarah dengan bantuan mediator yang berfungsi sebagai penengah yang bersifat. Fungsi mediator inilah yang dijalankan oleh KESBANGPOL dalam menangani konflik di wilayah Lombok Timur. Proses mediasi dilakukan saat acara-acara besar yang diselenggarakan oleh pemerintah, yang dimana di acara tersebut mengundang berbagai ormas sehingga pada kesempatan inilah dilakukan pendekatan untuk penyelesaian konflik atau masalah.

D. Kesimpulan

Konflik yang terjadi di Lombok Timur biasanya disebabkan karena perbedaan paham antar masyarakat dan pemberian aset yayasan yang tidak sesuai salah satu pihak, sehingga Kesbangpol disini berperan dengan menerapkan 3 metode yaitu observasi atau pengamatan, deteksi dini konflik untuk mencegah konflik semakin membesar, dan mediasi yaitu pendekatan yang dilakukan untuk penyelesaian konflik.

Kesbangpol Lombok Timur dalam melakukan penanganan tidak semerta-merta dengan penanganan secara instan tetapi ada prosedur dan menjalankan regulasi sesuai payung hukum dan aturan yang sudah ada.

Kesbangpol Lombok Timur juga memberikan suatu wadah untuk pelaku konflik guna melakukan mediasi dan lain-lain berharap apa yang ditangani bisa terselesaikan dengan baik dan bertujuan agar menghadirkan kesinambungan diantara masyarakat Lombok Timur khususnya Ormas yang terlibat konflik.

Persembahan

Karya ilmiah ini saya persembahkan untuk kedua orang tua yang selalu memberikan support dalam bentuk do'a, dukungan semangat dan materil sehingga saya dapat menyelesaikan karya ini. Kemudian terimakasih juga saya ucapkan kepada keluarga dan teman-teman saya yang telah memberi semangat dalam penyusunan karya ilmiah ini.

Daftar Pustaka

- Rohmanudin, A. O. (2021). Implementasi Uu No. 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Di Kabupaten Sumedang. *Journal Of Regional Public*
<http://jurnal.ilmuadministrasisebelasapril.ac.id/index.php/jrpa/article/view/85>
- Zulianto, Z., Junaidi, M., Soegianto, S., & Sadono, B. (2020). Kewenangan Polri Dalam Pembubaran Ormas Yang Telah Dibatalkan Status Hukumnya. *Jurnal Usm Law Review*, 3(2), 419.
<https://doi.org/10.26623/julr.v3i2.2868>
- Mandak, N. W., Gosal, R., & Monintja, D. K. (2022). Kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Dalam Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan Adat (Studi Kasus Di Badan Kesbangpolda). *Governance*.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/view/38099>
- Mediawati, D. (2019). Konflik Antar Etnis Dan Upaya Penyelesaian Hukumnya. In *Khazanah Hukum* (Vol. 1, Issue 1, pp. 36–49). core.ac.uk. <https://doi.org/10.15575/kh.v1i1.7134>
- Fendi, et al., (2019). Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Organizational Citizenship Behavior (OCB) dengan Tipe Kepribadian Big Five Sebagai Variabel Pemoderasi Pada Anggota Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Jember 2018-2023. <http://repository.unmuhjemer.ac.id>